

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	RENCANA AKSI	Anggaran (Rp)	Target				KELUARAN	Faktor Pendukung/Faktor Penghambat	Pemecahan Masalah	Monev Triwulan I	Faktor Pendukung/Faktor Penghambat	Pemecahan Masalah	Monev Triwulan II	Faktor Pendukung/Faktor Penghambat	Pemecahan Masalah	Monev Triwulan III	Faktor Pendukung/Faktor Penghambat	
						TW I	TW II	TW III	TW IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) UPK	93,8 %	Monitoring center for prevention (MCP) merupakan upaya yang dilakukan oleh KPR RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi. Ada 8 area yang dilakukan intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan				0		Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.	1. Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi korupsi dapat ditelusuri dengan baik. 2. Dihangankan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan		Telah ditetapkan SK Bupati tentang Tim MCP Kabupaten Temanggung, sehingga koordinasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dalam upaya pemenuhan indikator dalam MCP dapat dilaksanakan dengan baik.	1. Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi korupsi dapat ditelusuri dengan baik. 2. Dihangankan agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan							
	Matutrisa SIP	3,12	Nilai	Penilaian maturitisa SIP atau unsur-unsur SIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung		1,077	1,077		1,077 (Nilai)	1. Belum semua OPD dan personel mengerti akan pentingnya SIP. 2. Pengawasan/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan rekrutasi atau informasi terkait SIP kepada Perangkat Daerah. 3. ATP belum dapat mengawasi atas pelaksanaan SIP secara menyeluruh, terutama dengan terbataunya sumber daya manusia. 4. Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindakan Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP. 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh ATP atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD	3,077	1. Belum semua OPD dan personel mengerti akan pentingnya SIP. 2. Pengawasan/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindakan Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan rekrutasi atau informasi terkait SIP kepada Perangkat Daerah. 3. ATP belum dapat mengawasi atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD	3,077	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindakan Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP. 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh ATP atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD						
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,83	Nilai	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di instansi dan Badan Usaha Pemerintah dan sebuah upaya mengkonfirmasi kemajuan pengelolaan risiko korupsi di dalam organisasi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau Pengendalian korupsi. IEPK merupakan salah satu unsur dalam		3	3		3 (Nilai)	1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi. 2. Upaya peningkatan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah. 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal belum dilakukan. 4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan. 5. Komunikasi, pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan. 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan	1) Peningkatan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penggunaan pengukuran IEPK. 2) Upaya peningkatan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah. 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal belum dilakukan. 4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan. 5. Komunikasi, pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan. 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan	3	1. Belum dilakukan penetapan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP) yang eksplisit terkait antikorupsi. 2) Upaya peningkatan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah. 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal belum dilakukan. 4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan. 5. Komunikasi, pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan. 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan	3	1) Peningkatan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penggunaan pengukuran IEPK. 2) Upaya peningkatan persepsi pegawai terhadap keberadaan peraturan dan hukum sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan di organisasi pemerintah daerah. 3. Kontinuitas atas kegiatan pembelajaran antikorupsi kepada pihak internal belum dilakukan. 4. Penilaian risiko korupsi belum dilakukan. 5. Komunikasi, pimpinan terkait perilaku antikorupsi dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari perlu ditingkatkan. 6. Desain penyelenggaraan pengendalian korupsi yang masih memerlukan perbaikan						
	Kapabilitas ATP	3	Level	Kapabilitas ATP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki ATP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.		3	3		level 3	Perangkat Daerah terkait terbalut dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester. Hal ini disebabkan kapabilitasnya: 1. Kompetensi SDM belum memadai 2. Kuantitas SDM belum memadai 3. Kurangnya komitmen 4. kurangnya komunikasi 5. Anggaran belum memadai 6. Perencanaan kegiatan belum memadai 7. Sistem informasi tidak lanjut hasil pengawasan belum memadai.	(1) meningkatkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas ATP sebagai stimulan bagi Inspektur Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya; (2) mempertimbangkan untuk melakukan penumbuhan data operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD; 3. Anggaran belum memadai 4. Perencanaan kegiatan belum memadai 5. Sistem informasi tidak lanjut hasil pengawasan belum memadai.	3	Perangkat Daerah terkait terbalut dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester. Hal ini disebabkan kapabilitasnya: 1. Kompetensi SDM belum memadai 2. Kuantitas SDM belum memadai 3. Kurangnya komitmen 4. kurangnya komunikasi 5. Anggaran belum memadai 6. Perencanaan kegiatan belum memadai 7. Sistem informasi tidak lanjut hasil pengawasan belum memadai.	(1) meningkatkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas ATP sebagai stimulan bagi Inspektur Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya; (2) mempertimbangkan untuk melakukan penumbuhan data operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD; 3. Anggaran belum memadai 4. Perencanaan kegiatan belum memadai 5. Sistem informasi tidak lanjut hasil pengawasan belum memadai.	3	(1) meningkatkan kebijakan pemberian penghargaan dalam peningkatan kapabilitas ATP sebagai stimulan bagi Inspektur Kabupaten Temanggung agar lebih bersemangat dalam meningkatkan kapabilitasnya; (2) mempertimbangkan untuk melakukan penumbuhan data operasional yang memadai sebesar 1% dari APBD; 3. Anggaran belum memadai 4. Perencanaan kegiatan belum memadai 5. Sistem informasi tidak lanjut hasil pengawasan belum memadai.					
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (dengan indikator baru)	Matutrisa SIP	3,1	Nilai				3,077	3,077/3,077				Pendorong : 1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SIP yaitu Perbup Nomor 59 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh ATP atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD Penghambat : 1. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting) 2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur 3. Belum ada dokumen/indikator rapat mengenai laporan kinerja	1. Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindakan Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP. 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh ATP atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD Penghambat : 1. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting) 2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur 3. Belum ada dokumen/indikator rapat mengenai laporan kinerja	3,077	Pendorong : 1. Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SIP yaitu Perbup Nomor 59 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh ATP atas pelaksanaan Rencana Tindakan Pengendalian. 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitisa SIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1 x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitisa Penyelenggaraan SIP kepada OPD Penghambat : 1. Dokumen perencanaan yang ada belum menyajikan informasi yang berkaitan dengan kinerja bidang lain (crosscutting) 2. Belum ada rapat rutin/monev triwulanan atau semesteran yang dipimpin oleh Inspektur 3. Belum ada dokumen/indikator rapat mengenai laporan kinerja					
	Kapabilitas ATP	3,003	Level				3,000	3,000/level 3					Pendorong : 1) Menyusun, melengkapi dan melakukan pemutakhiran dokumen untuk peningkatan penilaian IEPK. 2) Menyempurnakan Renstra OPD untuk memantapkan secara tertulis kebijakan antikorupsi. 3) Menyempurnakan profil risiko OPD dengan melakukan identifikasi, analisis, peta risiko dan rencana tindak pencegahan 4) Mengoptimalkan fungsi whistleblowing system. 5) Mendorong pimpinan satuan kerja untuk mematuhi tata kelola, penyampaian informasi manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi. 6) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 7) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 8) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 9) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 10) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 11) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 12) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 13) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 14) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 15) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 16) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 17) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama tidak terulang. 18) Melakukan perbaikan-perbaikan sistem pengendalian pada kejadian-kejadian korupsi sehingga kejadian/perbuatan yang sama								

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Temanggung, Januari 2026
INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

WIDIYATRI WIDODONO, Mui
Pemrina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Pemecahan Masalah	Money Timeline IV
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
1. Perlu diadakan limitasi dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat Daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTR; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APSP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan muturas SPH di Kabupaten Tembungong secara rutin (1 set tahun); 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan limitasi tentang Muturas Penyelenggaraan SPH kepada OPO.	3.077
1) Peningkatan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penanganan pengurusan BPK. 2) Upaya peningkatan IPRK secara terintegrasi dengan upaya peningkatan muturas SPH dan kapabilitas aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 3) Sosialisasi dan pemahaman ke K/L arti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IPRK menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.	3.080

1) Peningkatan kompetensi auditor investigasi yang mendukung penguatan pengukuhan IEPE. 2) Upaya peningkatan IEPE secara terintegrasi dengan upaya peningkatan maturitas SPIP dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 3) Sosialisasi dan pemahaman ke KL, anti penting pencegahan korupsi yang efektif dan IEPE menjadi dasar bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas manajemen risiko dan penguatan pengendalian anti korupsi.	3.000
	91.95
1. Memperbaiki dokumen perencanaan dengan menambahkan informasi crosscutting 2. Mendokumentasikan rapat capaian money trailulan atau semesteran yang dipimpin oleh inspektur 3. Mendokumentasikan rapat mengenai laporan kinerja	78.15
Nilai	0
1. melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap Auditor dan PPUPD. 2. melaksanakan PKS bersama Inspektorat Kab/Kota lain yang telah selesai reviu Renstra dengan aplikasi e-Review dari Mendagri. 3. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan OPD melalui kegiatan fasilitasi atau pendampingan pengawasan. 4. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan BAPPIDA selaku fasilitator OPD pada penyusunan Renstra	20
1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam tim. 2. Rencana penugasan dimasukkan dalam PKPT untuk meminimalisir tumpang tindih penugasan. 3. Untuk penugasan yang melibatkan beberapa OPD, dilaksanakan rapat koordinasi sebelum penugasan. 4. Pembagian penugasan internal tim dan mengoptimalkan waktu penugasan sebagai upaya penyelesaian laporan tepat waktu. 5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal tim maupun eksternal dengan PD terkait pemenuhan dokumen melalui media IT.	65
Pemeriksa disusun untuk mengikuti pelatihan peningkatan pekerjaan fiskal	5

1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindak lanjut dari abrak kepada bupati dengan mengundang Dhyek yang diperikas 2. Dilakukan Derak kepada Dhyek yang penyelesaian tindak lanjutnya lama. 3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan	21
NIHL (sudah dilaksanakan)	0
1. Perlu dirumuskan pelaksanaan revisi HPS yang lebih efektif dan efisien antara bidang Pengadaan Barang/Jasa (UK PR) dan Inspektorat 2. Perlu dilakukan penyamaan persepsi antara APJP dan Auditee atas fungsi assurance pada probity audit 3. APJP mendapat akses sistem informasi pengadaan barang/jasa 4. Optimisasi sinergitas antara APJP dengan pihak eksternal (kejaksaan) atas fungsi pendampingan hukum proses pengadaan barang/jasa.	17
1. Evaluasi Register Risiko agar dilaksanakan tepat waktu dan diperstapikan aplikasi mengingat evaluasi dilaksanakan setiap tahun 2. Koordinasi dan komunikasi dengan Inspektorat Prov. Jateng untuk mendapatkan informasi atau draft Permenadagri tentang Herbinwas	1
1. MCP KPK Secara terus menerus melakukan koordinasi kepada PIC KPK RI Mendorong Perangkat Daerah dalam proses pencapaian pemenuhan MCP KPK 2. Pendampingan Desa Antikorupsi Melaksanakan asistensi kepada Desa Antikorupsi Mendorong kepada desa untuk melaksanakan pemenuhan indikator desa antikorupsi 3. Sosialisasi Antikorupsi Melibatkan Penyuluh Antikorupsi dalam setiap kegiatan edukasi pencegahan korupsi 4. Sabar Pungli Membuat timeline penjadwalan kegiatan selama 1 tahun Secara terus menerus melakukan koordinasi kepada Tim Satgas Sabar Pungli 5. Hakordia Mempercepatkan dan mengkoordinasikan kegiatan lebih awal	0

1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBS/WBSM Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada Perangkat Daerah yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas Berkordinasi dengan kementerian dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan 2) Dilaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah yang dicanangkan sebagai 21 2. Evaluasi RB Ex Ante dan On Going Mendorong perangkat daerah dalam upaya pencapaian target RB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 3. Kapabilitas APP Mendorong Sinergis Kapabilitas APP dalam upaya pemenuhan tindak lanjut maupun indikator dalam setiap elemennya.	0
3. Perlu diadakan bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP; 2. Perlu dilakukan evaluasi oleh APP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian; 3. Perlu dilakukan Self Assessment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (1x setahun) 4. Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPO	0

